

**TANGGUNG JAWAB PENJUAL YANG BELUM
CUKUP UMUR ATAS PENGIRIMAN BARANG
DENGAN SPESIFIKASI TIDAK SESUAI DENGAN
PESANAN DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI
*E-COMMERCE***

SKRIPSI



LUISA ENI BUDIONO

NIM : 02109070

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA
2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan: Latar Belakang dan Perumusan	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penelitian	12
5. Manfaat Penelitian	13
6. Metode Penelitian	13
7. Pertanggungjawaban Sistematika	18
 BAB II PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM	
TRANSAKSI JUAL BELI <i>E-COMMERCE</i>	19
1. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli <i>E-Commerce</i>	19

2. Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli	
<i>E-Commerce</i>	26

BAB III TANGGUNG JAWAB PENJUAL YANG BELUM CUKUP

UMUR ATAS PENGIRIMAN BARANG DENGAN	
SPEKIFIKASI TIDAK SESUAI PESANAN DALAM	
TRANSAKSI JUAL BELI <i>E-COMMERCE</i>	49

1. Tanggung Jawab Penjual Atas Pengiriman Barang Dengan	
Spekifikasi Tidak Sesuai Dengan Pesanan Dalam Transaksi	
Jual-Beli <i>E-Commerce</i>	49
2. Tanggung Jawab Penjual Pada Kondisi Belum Cukup Umur	
Atas Pengiriman Barang Dengan Spekifikasi Tidak Sesuai	
Dengan Pesanan Dalam Transaksi Jual-Beli <i>E-Commerce</i>	70

BAB IV PENUTUP	82
----------------------	----

1. Kesimpulan	82
2. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Penjual Yang Belum Cukup Umur Atas Pengiriman Barang Dengan Spesifikasi Tidak Sesuai Dengan Pesanan Dalam Transaksi Jual-Beli *E-Commerce*” bertujuan yang pertama untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui *e-commerce*. Kedua untuk mengetahui tanggung jawab penjual yang belum cukup umur atas pengiriman barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi tidak sesuai pesanan dalam transaksi jual beli *e-commerce*.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta beberapa literatur hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam jual beli *e-commerce* secara umum diatur dalam bentuk hak dan kewajiban dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen dilindungi dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual, sebaliknya hal penjual akan terpenuhi dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli. Dalam kasus transaksi jual beli *e-commerce* -seperti pada jual beli yang secara umum dilakukan- posisi konsumen berada dalam kondisi yang lebih lemah dari penjual. Oleh karena itu perlindungan hukum dalam transaksi jual-beli *e-commerce* lebih menekankan pada perlindungan bagi konsumen. Dalam kasus penjual belum cukup umur mengirimkan barang dengan spesifikasi tidak sesuai dengan pesanan konsumen, maka konsumen tetap berhak untuk meminta ganti rugi kepada penjual yang belum cukup umur tersebut. Keberadaan penjual yang belum cukup umur tidak serta merta membatalkan transaksi jual beli *e-commerce* antara kedua belah pihak. Apabila penjual yang belum cukup umur tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya memberikan ganti rugi sesuai nominal yang telah disepakati atau nominal yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka orang tua atau wali penjual belum cukup umur tersebut yang berkewajiban untuk memenuhi ganti rugi yang telah ditentukan. Ketika kasus penjual mengirimkan barang dengan spesifikasi tidak sesuai pesanan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana, misalnya adalah penipuan, dan ketika pengadilan telah memutuskan sanksi pidana kepada penjual belum cukup umur, maka orang tua/wali tidak harus menanggung sanksi pidana penjual tersebut. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa.

Kata kunci: tanggung jawab, *e-commerce*, penjual, belum cukup umur

ABSTRACT

The study, entitled "Responsibilities of the Seller Which Not Enough Age on Delivery Product with Specifications Does Not Match Orders Sale at E-Commerce Transactions" aims first to know the form of legal protection for the parties in the purchase agreement through e-commerce. The second to determine the responsibility of the seller is not old enough for the delivery of goods which do not conform to the specification does not match the order in the buying or selling of e-commerce.

The method used in this thesis is a normative juridical research method, the research refers to the norms and principles of law contained in the legislation, court decisions, as well as some legal literature related to the issues discussed.

The results showed that legal protection can be given to the parties in the sale and purchase of e-commerce generally arranged in the form of rights and obligations under the Consumer Protection Act. Consumer rights are protected by their obligations to be fulfilled by the seller, otherwise the seller will be met with an obligation that must be met by the buyer. In the case of purchase transactions-such as e-commerce on the sale and purchase of the general's doing the consumer is in a position that is weaker than the seller. Therefore the legal protection in the transaction e-commerce more emphasis on consumer protection. In case the seller is not old enough not deliver the goods with the specifications in accordance with customer orders, the consumer retains the right to seek damages to the seller who are not old enough. The existence of a seller who is not old enough not automatically cancel the sale and purchase transactions of e-commerce between the two sides. If the seller is not old enough not being able to fulfill its obligations provide appropriate compensation agreed notional or nominal predetermined by the court, the parents or guardians are not old enough sellers are obliged to meet the compensation has been determined. When the case of the seller sends the goods do not conform to the specifications of the order is entered into the realm of criminal law, for example, is a fraud, and when the court has decided to criminal sanctions to the seller is not old enough, parents / guardians should not bear criminal sanctions that seller. According to Article 26 paragraph (1) of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Court (Juvenile Court Act), imprisonment for a child who commits an offense is half of the maximum penalty of imprisonment for those who are older.

Keywords: responsibility, e-commerce, the seller, not old age

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada para pihak dalam jual beli *e-commerce* secara umum diatur dalam bentuk hak dan kewajiban dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen dilindungi dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual, sebaliknya hal penjual akan terpenuhi dengan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pembeli. Dalam kasus transaksi jual beli *e-commerce* -seperti pada jual beli yang secara umum dilakukan- posisi konsumen berada dalam kondisi yang lebih lemah dari penjual. Oleh karena itu perlindungan hukum dalam transaksi jual-beli *e-commerce* lebih menekankan pada perlindungan bagi konsumen.
- b. Dalam kasus penjual belum cukup umur mengirimkan barang dengan spesifikasi tidak sesuai dengan pesanan konsumen, maka konsumen tetap berhak untuk meminta ganti rugi kepada penjual yang belum cukup umur tersebut. Keberadaan penjual yang belum cukup umur tidak serta merta membatalkan transaksi jual beli *e-commerce* antara kedua belah pihak. Apabila penjual yang belum cukup umur tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya memberikan ganti rugi sesuai nominal yang telah disepakati atau nominal yang telah ditentukan oleh pengadilan, maka orang tua atau

wali penjual belum cukup umur tersebut yang berkewajiban untuk memenuhi ganti rugi yang telah ditentukan. Ketika kasus penjual mengirimkan barang dengan spesifikasi tidak sesuai pesanan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana, misalnya adalah penipuan, dan ketika pengadilan telah memutuskan sanksi pidana kepada penjual belum cukup umur, maka orang tua/ wali tidak harus menanggung sanksi pidana penjual tersebut. Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak), ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa. Sekalipun dalam kasus ini tanggung jawab penjual yang belum cukup umur dalam pengiriman barang dalam spesifikasi tidak sesuai pesanan dalam transaksi jual beli *e-commerce*, sudah dapat diselesaikan secara musyawarah maupun melalui jalur non litigasi, maka proses hukum secara pidana tetap harus dilaksanakan dan selanjutnya bergantung pada putusan pengadilan yang memutuskan, dengan pertimbangan hakim bahwa telah ada penyelesaian antara kedua belah pihak.

2. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

- a. Hendaknya para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli *e-commerce*, khususnya pembeli selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan transaksi jual-beli karena praktik ini tidak mempertemukan para pihak secara langsung melainkan hanya melalui media elektronik sehingga

rawan terjadi penipuan. Konsumen hendaknya mengenali terlebih dahulu alamat web yang menyediakan jasa jual beli *e-commerce* serta memahami dengan betul klausa baku yang diadakan oleh pihak penjual. Selain itu konsumen juga perlu untuk memahami hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam transaksi yang dilakukan.

- b. Upaya penyelesaian masalah dengan cara meminta ganti rugi hendaknya lebih diutamakan ketika terjadi kasus wanprestasi dalam transaksi jual beli *e-commerce* berupa pengiriman barang yang tidak sesuai pesanan. Terlebih lagi ketika penjual yang melakukan wanprestasi berupa pengiriman barang tidak sesuai dengan spesifikasi pesanan tersebut adalah anak belum cukup umur. Ketika proses pemberian ganti rugi ini sulit dilakukan dan harus masuk ke dalam ranah pengadilan, maka hendaknya pengadilan perdata lebih diutamakan dibandingkan dengan pengadilan pidana, mengingat dalam pengadilan perdata wali anak yang belum cukup umurlah yang harus bertanggung jawab, sementara itu dalam pengadilan pidana anak yang belum cukup umur tersebut bisa diproses secara hukum. Memproses anak belum cukup umur dalam pengadilan pidana, apabila sampai menjatuhkan pidana penjara kepada anak dapat merusak masa depan anak karena anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik selama menjalani pidana penjara.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004

Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan (penjelasan pasal 1233 sampai 144 BW)*, Rajawali Pers, Bandung, 2008

Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999

Chatamarrasjid Ais, *Penerobosan Cadar Perusahaan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, 2004

Cristina Coteanu, *Cyber Consumer Law and Unfair Trading Practices*, Ashgate, London, 2005

Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta, 2007

Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspel Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Dudu Dusuna, Mahjudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sebuah Sketsa, Renika Aditama, Bandung, 2000

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, Grafindo Persada, 2004

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2006

Isis Ikhwansyah, *Seri Dasar Hukum Ekonomi 12, Cyber Law, Suatu Pengantar, Prinsip-Prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce Dan*

Sisitem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, Elips II, 2002

Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHPPenyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Richard Eddy, *Aspek Legal Properti*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2007

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995

R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Suharnoko, *Hukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasus)*, Prenada Media, Jakarta, 2004

JURNAL HUKUM

Adnan Buyung Nasution, *Hukum dan Keadilan*, Majalah Hukum, Nomor 1, 1996

Grace Joice S. N. Rumimper, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet*, *Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulagi*, Vol.I/No.3/Juli-September /2013

Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004

Johanes Gunawan, *Product Liability Dalam Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia Tahun XXI Nomor 2, April 1994

Lia Sautunnida, *Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Kajian Menurut Buku III KUH Perdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008

Marheni, N. P., *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berkaitan Dengan Pencantuman Disclaimer Oleh Pelaku Usaha Dalam Situs Internet (Website)*. Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2013

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam masyarakat yang sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Nomor 16 Tahun X/ 2007.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Tanggung Jawab*, 2015, Diakses dari <http://kbbi.web.id/tanggung+jawab> pada 19 Januari 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Penjual*, 2015, Diakses dari <http://kbbi.web.id/jual> pada 19 Januari 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Arti Spesifikasi*, 2015, Diakses dari <http://kbbi.web.id/spesifikasi> pada 19 Januari 2016

Letezia Tobing, 12 Februari 2016, *Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan> pada 14 Februari 2016

Hukum online, *Tanggung Jawab Orang Tua Jika Anak Melakukan Tindak Pidana*, Diakses dari www.hukumonline.com/klinik/detail/lt522d2ab21bd71/tanggung-jawab-orang-tua-jika-anak-melakukan-tindak-pidana pada 14 Februari 2016

Rafika Khalila, *Aspek Hukum ,Asuransi Kerugian Dalam Electronic commerce*, 2008, Diakses dari www.legalitas.Org pada 19 Januari 2016

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<http://www.ilmuhukum.net/2015/09/teori-perlindungan-hukum-menurut-para.html>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50bf69280b1ee/perlindungan-konsumen-dala-e-commerce>

